

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. 2024. *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta: Direktorat P2Humas KPDJP.
- Cindy, C. 2023. *Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia*. Indonesia Journal of Business Law, 2(1), 38-46.
- DJP, 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). [Daring] Tersedia di: <https://www.djponline.pajak.go.id>. [Diakses 18 Maret 2024]
- DJP, 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). [Daring] Tersedia di: <https://www.pajak.go.id/id/> [Diakses 18 Maret 2024]
- Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, & Indra Hastuti. 2022. *Pengantar Hukum Pajak*. PUSTAKABARUPRESS.
- Hadistiyah, A. A. Q., & Putra, R. J. (2022). Efektivitas Pelaporan Pajak Di Indonesia. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(3), 2490-2498.
- Hidayat, N dan Purnawa, D. 2018. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB*. Jakarta: IAI.
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. 2022. *Pelatihan Perpajakan PPh Pasal 21 Pada Guru Dan Murid SMKN 4 Bandar Lampung*. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 3(2), 293-296.
- Julito, K. A., & Ramadani, I. (2023). Dampak dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11%. Media Akuntansi Perpajakan, 8(2), 96-103.
- Kadafi, M., & Anggraini, T. N. (2022). Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT Bintang Kaltim Sangasanga Tahun 2018. Jurnal EKSIS, 18(2), 71-82.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mayasari, R. (2021). *Perpajakan I* (J.Febriantoko (ed.)). CV Amanah.

Oktavia, K., & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT Stepa Wirausaha Adiguna Untuk Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 433-440.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik mendefinisikan *e-billing*.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.

Sastrawan, G., & Wahyoni, I. A. P. I. (2021). Pengeanaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24-35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.